



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS
PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis Pemerintah Kota Dumai.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 18 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS PEMERINTAH KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
7. Unit Kearsipan I adalah Unit Kearsipan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
8. Unit Kearsipan II adalah Unit Kearsipan yang diselenggarakan oleh sekretariat atau bagian yang menangani urusan tata usaha pada Perangkat Daerah.
9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

11. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
12. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
13. Klasifikasi adalah proses identifikasi dan pengelompokan kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan.
14. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
15. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah pengkategorian atau penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
16. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
17. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
18. Sangat rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau keselamatan bangsa.
19. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum.
20. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
21. Biasa/terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
22. Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengelompokan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.
23. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari dalam lingkungan Perangkat Daerah.
24. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Perangkat Daerah.
25. Pengawas adalah pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan.
26. Aparat Penegak Hukum adalah pejabat yang mempunyai hak untuk mengakses arsip dari pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
27. Analisis Fungsi Unit Kerja adalah kegiatan melakukan analisis terhadap fungsi unit kerja, baik fasilitatif dan substantif menganalisa guna menentukan fungsi-fungsi strategis dalam Perangkat Daerah.
28. Analisis Uraian Jabatan adalah kegiatan menganalisa klasifikasi jabatan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab jabatannya guna menentukan hak akses terhadap informasi arsip dinamis yang tercipta di setiap Perangkat Daerah.

29. Analisis Risiko adalah kegiatan melakukan analisis dan pertimbangan sejauhmana pengklasifikasian keamanan dan hak akses arsip dinamis terhadap risiko yang ditimbulkan apabila diketahui pihak tidak berhak.
30. Penentu Kebijakan adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya.
31. Pelaksana Kebijakan adalah pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa.

BAB II SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 2

Peraturan WaliKota ini ditetapkan sebagai Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 4

Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia;
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.

Pasal 5

Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sangat rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.

Pasal 6

Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.

Pasal 7

Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c, apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan.

Pasal 8

Tingkat Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis biasa/terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, apabila dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

Pasal 9

Prinsip dasar dalam penentuan hak akses arsip dinamis adalah:

- a. pengaksesan arsip dinamis hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan staf yang mempunyai kewenangan untuk akses;
- b. pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf dibawahnya sesuaidengan hirarki kewenangan dalam struktur organisasi; dan
- c. pejabat atau staf yang lebih rendah kedudukannya tidak dapat mengakses arsip yang dibuat oleh pejabat di atasnya kecuali sebelumnya telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Penentuan klasifikasi hak akses arsip dinamis dimaksudkan untuk:

- a. melindungi fisik dan informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas dan reliabilitas arsip tetap dapat terpenuhi; dan
- b. mengatur akses arsip dinamis yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 11

- (1) Penggolongan pengguna yang berhak mengakses arsip dinamis adalah:
 - a. pengguna di lingkungan internal Perangkat Daerah; dan
 - b. pengguna di lingkungan eksternal Perangkat Daerah.
- (2) Pengguna hak akses arsip dinamis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. penentu kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. pelaksana kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak akses arsip dinamis bagi penentu kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah:
 - a. pimpinan tingkat tertinggi mempunyai kewenangan mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tertinggi) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar kerjanya kecuali telah mendapatkan izin;

- c. pimpinan tingkat menengah (1 (satu) tingkat di bawah pimpinan tingkat tinggi) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- (4) Pengguna hak akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka;
 - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
 - (5) Penentuan klasifikasi hak akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis fungsi unit kerja Perangkat Daerah, *job description*, analisis risiko dan penentuan kategori klasifikasi kemanan.

BAB III PENGAMANAN TINGKAT KLASIFIKASI

Pasal 12

Untuk melakukan pengamanan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi yang sudah ditentukan, pencipta arsip mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus memperhatikan penyimpanan dan penyampaian informasi arsip dinamis.

BAB IV PENYIMPANAN FISIK DAN INFORMASI ARSIP DINAMIS

Pasal 13

- (1) Penyimpanan fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan pada tingkat klasifikasi kemanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (2) Penyimpanan arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanannya harus memperhatikan:
 - a. media simpan arsip; dan
 - b. prasarana dan sarana yang dipergunakan.
- (3) Media simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi media simpan arsip konvensional dan elektronik.
- (4) Prasarana dan sarana yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan jenis media simpan arsip dinamis.
- (5) Teknik penyimpanan fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan pada tingkat klasifikasi.

BAB V
PENYAMPAIAN FISIK DAN INFORMASI ARSIP DINAMIS

Pasal 14

- (1) Penyampaian fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan pada tingkat klasifikasi keamanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a.
- (2) Ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi sangat rahasia, berlaku juga pada arsip dengan klasifikasi rahasia dan terbatas.
- (3) Ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi rahasia, berlaku juga pada arsip dengan klasifikasi terbatas.
- (4) Teknik penyampaian fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan pada tingkat klasifikasi keamanan arsip.

BAB VI
DAFTAR ARSIP DINAMIS BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 15

- (1) Penyusunan Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Keanggotaan tim meliputi unsur unit kerja pada Perangkat Daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan disesuaikan menurut kebutuhan Perangkat Daerah.
- (4) Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis dapat dilakukan revisi seiring dengan perubahan struktur, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis dibuat dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
PROSEDUR PENYUSUNAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 16

- (1) Langkah-langkah pembuatan Daftar Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis adalah:
 - a. ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. tugas dan fungsi serta uraian jabatan masing-masing unit kerja;
 - c. analisis risiko jenis arsip dinamis yang tercipta;
 - d. hasil analisis risiko dijadikan dasar untuk pengelompokkan kategori tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
 - e. identifikasi jenis arsip dinamis yang tercipta di Perangkat Daerah; dan
 - f. penentuan kategori Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis pada setiap jenis arsip yang diidentifikasi.
- (2) Penuangan jenis arsip berdasarkan tingkat klasifikasi dan hak akses ke daftar Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis.
- (3) Penuangan dasar pertimbangan ke daftar Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis.
- (4) Mencantumkan unit pengolah ke daftar Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis.

- (5) Penyusunan draft Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis.
- (6) Pembahasan draft Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis dengan unit kerja di Perangkat Daerah.
- (7) Persetujuan draft Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis oleh unit kerja di Perangkat Daerah.
- (8) Pengesahan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Langkah-langkah terhadap aspek ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan mencari landasan hukum yang berkaitan dengan keterbukaan dan tertutupan arsip untuk penentuan klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis.
- (2) Langkah-langkah terhadap tugas dan fungsi serta uraian jabatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan menganalisa tugas dan fungsi serta uraian jabatan di perangkat daerah untuk mengetahui fungsi-fungsi strategis unit kerja perangkat daerah dan memahami kewenangan, tanggungjawab dan hak akses untuk masing-masing jabatan.
- (3) Langkah-langkah terhadap analisis risiko sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menganalisa dampak resiko yang timbul apabila fisik dan informasi arsip dinamis terakses oleh pihak yang tidak berhak.

BAB VIII

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANANDAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 18

- (1) Daftar Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis terdiri dari:
 - a. nomor;
 - b. kode klasifikasi;
 - c. jenis arsip;
 - d. klasifikasi keamanan;
 - e. hak akses;
 - f. dasar pertimbangan; dan
 - g. nama unit pengolah.
- (2) Daftar klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis menjadi acuan dalam keterbukaan dan tertutupan informasi arsip dinamis bagi pengguna.
- (3) Daftar klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 19

Pengaturan akses arsip diuraikan sebagai berikut:

- a. kode angka 000 bidang tugas umum;
- b. kode angka 100 bidang tugas pemerintahan;
- c. kode angka 200 bidang tugas politik;
- d. kode angka 300 bidang tugas keamanan dan ketertiban;

- e. kode angka 400 bidang tugas kesejahteraan;
- f. kode angka 500 bidang tugas perekonomian;
- g. kode angka 600 bidang tugas pekerjaan umum dan ketenagakerjaan;
- h. kode angka 700 bidang tugas pengawasan;
- i. kode angka 800 bidang tugas kepegawaian; dan
- j. kode angka 900 bidang tugas keuangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 September 2021

WALIKOTA DUMAI,

TTD

PAISAL

Diundangkan di Dumai
Pada tanggal 2 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

TTD

SYAHRINALDI

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 35 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 44 TAHUN 2021
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP
 DINAMIS PEMERINTAH KOTA DUMAI

DAFTAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS KOTA DUMAI

I. UMUM (000).

NO	KODE	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	000	Umum					
	001	Lambang	Meliputi Garuda, Pemerinah Provinsi, Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	002	Bendera Kebangsaan.		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	003	Hari Raya/Besar	Hari Nasional, Hari Raya Keagamaan, Hari Kedinasan	Biasa/Terbuka	Internal dan Eksternal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	004	UcapanTerima Kasih/Selamat		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	005	Undangan	Jika Terkait Dengan Tugas Pokok Instansi Mengikuti Keegiatannya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	006	Tanda Jabatan	Pamong Praja, Jabatan lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	007	Penghargaan	Administrasi Pemberian Penghargaan/Tanda Kenang-Kenangan Kepada Masyarakat yang Memiliki Jasa Prestasi Besar	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
2.	010	Urusan Dalam		Terbatas	Eselon II dan III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat
	011	Gedung Kantor	Meliputi Pinjam Tempat, Termasuk Instalasinya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	012	Rumah Dinas	Administrasi Penggunaan Fasilitas Kantor Meliputi Permintaandan Penggunaan Ruang, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinasdan Fasilitas Kantor lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	012.1	Tanah Untuk Rumah Dinas		Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	012.2	Perabot Rumah Dinas		Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	012.3	Rumah Dinas Golongan 1		Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	012.4	Rumah Dinas Golongan 2		Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	012.5	Rumah Dinas Golongan 3		Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	012.6	Rumah/Bangunan lainnya		Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	012.7	Rumah Pejabat Negara		Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	013	Mess Pegawai/ Guest House		Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	014	Pemasangan GambarPresiden/Wakil Presiden		Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	015	Penerangan Listrik	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telpندان Komputer (Pemeliharaan dan Pemasangan)	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat

1	2	3	4	5	6	7	8
	015	Penerangan Listrik	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telpondan Komputer (Pemeliharaan dan Pemasangan)	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	016	Telpon/ <i>Faximile, E-mail</i>		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	017	Keamanan/Ketertiban Kantor	a. Pengamanan Penjagaan dan Pengawasan Terhadap Pejabat, Kantor, dan Rumah Dinas (Daftar Nama Satuan Pengamanan, Daftar Jaga, Catatan Gangguan, Surat Ijin Keluar Masuk Orang atau Barang); b. Laporan Ketertiban dan Keamanan (Kehilangan, Kerusakan, Kecelakaan dangangguan); dan c. Administrasi Pengelolaan Parkir.	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	018	Kebersihan Kantor		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	019	Protokol	Meliputi Tata Upacara, Tata Acara/Tempat, Audiensi, Sambutan,Alamat Kantor dan Pejabat.	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
3.	020	Peralatan		Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	020.1		Penawaran	Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	021		Alat-Alat Tulis	Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	022	Peralatan Gedung Kantor	Komputer/Laptop, <i>Liquid Crystal Display, Scanner, Digital Versatile Disc/ Video Compact Disc, Player, Product Mixer,Laser Disc</i> , Generator, Mesin Potokopi, Mesin Tik Manual	Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	023	Perlengkapan Gedung Kantor	<i>Mobilier, Filing Cabinet</i> , Brankas, <i>White Board</i> , Radio, <i>Television, Tape, Air Conditioner</i> , Lemari Es, Kipas Angin, <i>Wireless/SoundSystem/Speaker</i> /Kameradan lain-lain	Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	024	Alat Angkutan	Kendaraan Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	025	Pakaian Dinas	Administarsi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihandan Pegawai lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	026	Senjata					
	027	PengadaanBarang dan Jasa		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat
028	Inventaris		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat	
4.	030	Kekayaan/Aset Daerah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	031	Aset Tetap	Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	032	Aset Lancar	Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Piutang lain-lain dan Persediaan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	033	Aset lainnya	Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan, Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud (<i>Soft Ware</i>), dan Aset lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	034	Surat berharga	Saham,Obligasi,Tabungan,Deposito	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
5.	040	PerpustakaanDokumentasi, Kearsipan/Sandi					
	041	Perpustakaan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan
	041.1	Umum		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan
	041.2	Khusus		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan

1	2	3	4	5	6	7	8
	041.3	Perguruan Tinggi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan
	041.4	Sekolah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan
	041.5	Keliling		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan
	042	Dokumentasi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perpustakaan
	045	Kearsipan					
	045.1	Pola Klasifikasi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan
	045.2	Penataan Berkas		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	045.3	Penyusutan Arsip		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan
	045.31	Jadwal retensi Arsip		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan
	045.32	Pemindahan Arsip		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan
	045.33	Penilaian Arsip		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan
	045.34	Pemusnahan Arsip		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan
	045.35	Penyerahan Arsip		Terbatas	Eselon II, III, IV dan Arsiparis	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan
	045.36	Berita Acara Penyusutan Arsip		Terbatas	Eselon II, III, IV dan Arsiparis	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan
	045.37	Daftar Pencarian Arsip		Terbatas	Eselon II, III, IV dan Arsiparis	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan
	045.4	Pembinaan Kearsipan		Terbatas	Eselon II, III, IV dan Arsiparis	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan
	045.41	Bimbingan Teknis		Terbatas	Eselon II, III, IV dan Arsiparis	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan
	045.5	Pemeliharaan/Perawatan Arsip		Biasa/Terbuka	Eselon II,III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan
	045.6	Pengawetan/Fumigasi		Biasa/Terbuka	Eselon II,III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Kearsipan
	046	Sandi		Rahasia	Eselon II dan III	Memiliki Dampak Keamanan Rahasia Negara	Sekretariat
	047	Website		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	048	Pengelolaan Data		Terbatas	Eselon II dan III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	049	Jaringan Komunikasi Data		Terbatas	Eselon II dan III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Bidang Teknis
6.	050	Perencanaan					
	050.1	Rencana Pembangunan Lima Tahun/8 Sukses		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat

1	2	3	4	5	6	7	8
	050.11	Pembangunan Lima Tahun Daerah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat
	050.12	Bantuan Pembangunan Daerah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	050.13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	051	Bidang Pemerintahan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	052	Bidang Politik		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	053	Bidang Keamanan dan Ketertiban		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	054	Bidang Kesejahteraan Rakyat		Biasa/terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	055	Bidang Perekonomian		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	056	Bidang Pekerjaan Umum		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	057	Bidang Pengawasan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat
	058	Bidang Kepegawaian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat
	059	Bidang Keuangan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
7.	060	Organisasi Ketatalaksana					
	061	Organisasi Instansi Pemerintah	Struktur Organisasi	Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	061.1	Susunan dan tata kerja		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	061.2	Tata Tertib Kantor, Jam Kerjasi Bulan Puasa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	062	Organisasi Non Pemerintah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	063	Organisasi Internasional		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	064	Organisasi Semi Pemerintah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	065	Tata Laksana	Prosedur, Metode dan Sistem Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	066	Stempel Dinas		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	067	Standarisasi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	068	Tata Naskah Dinas		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	069	Analisis Formasi dan Jabatan	Penyusunan Pedoman Analisis Beban Kerja, Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Kebutuhan Pegawai, Pedoman Kualifikasi Jabatan Struktural dan Fungsional Umum dan Penentuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu	Terbatas	Eselon II dan III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat
8.	070	Penelitian					
	071	Riset		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	072	Survei/Observasi		Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	073	Kerjasama Penelitian		Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	074	Pengembangan Penelitian		Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
9.	080	Konferensi/Rapat Koordinasi/Forum Komunikasi					
	081	Gubernur		Biasa/terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	082	Bupati/Walikota		Biasa/terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	083	Tingkat Regional		Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	084	Tingkat Nasional		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	085	Tingkat Internasional		Biasa/Terbuka	Eselon II dan III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
10.	090	Perjalanan Dinas/Kunjungan Kerja/Studi Banding					
	091	Presiden/Wakil Presiden		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat
	092	Menteri, Pejabat setingkat Menteri dan Pejabat Negara		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat
	093	Pejabat Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat
	094	Pejabat Politik (Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat
	095	Tamu Asing		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat
	096	Pegawai		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat
	097	Non Pegawai		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Sekretariat

II. PEMERINTAHAN (100).

NO	KODE	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100	Pemerintahan					
2.	110	Pemerintahan Pusat		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	111	Presiden	Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan, Pertanggungjawaban Presiden, Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	112	Wakil Presiden	Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	113	Susunan Kabinet	Reshuffle, Penunjukan Menteri Ad Interim, Sidang Kabinet	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	114	Kementerian Dalam Negeri		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	115	Kementerian Lainnya		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	116	LembagaTinggi/Tertinggi Negara	Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung,Badan Pemeriksa Keuangan dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	117	Lembaga Non Kementerian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	118	Otonomi/Desentralisasi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	119	Kerjasama Antar Kementerian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
3.	120	Pemerintahan Provinsi/Daerah	Laporan Daerah, Monografi, Koordinasi, Instansi Tingkat Pemerintah Provinsi/Daerah, Dinas Otonom, Instansi Vertikal	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	121	Kepala Daerah	Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Penetapan, Pelantikan,Pemberhentian, Serah Terima Jabatan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	122	Wakil Kepala Daerah	Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Penetapan, Pelantikan,Pemberhentian, Serah Terima Jabatan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	123	Sekretaris Daerah	Pencalonan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	124	Badan/Lembaga Non Struktural Daerah	Muspida, Dewan Kebudayaan, Dewan Pendidikan, Dewan Pustaka dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	125	Pembentukan/Pemekaran	Pemberian/Perubahan Nama Kepada Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa, Sungai, Pulau, Selat, Jalan, Benda Geografis dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	126	Pembagian Wilayah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	127	Penyerahan Urusan/Kewenangan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	128	Swapraja/Penataan Wilayah/Daerah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
4.	130	Pemerintahan Kabupaten/Kota	Laporan Kabupaten/Kota, Monografi, Koordinasi, Instansi Tingkat Kabupaten/Kota, Dinas Otonom dan Instansi Vertikal	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	131	Bupati/Wali Kota	Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
			Berita acara Serah terima Jabatan dan atau Meninggal	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	132	Wakil Bupati/Wali Kota	Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Penetapan, Pelantikan,Pemberhentian, Serah Terima Jabatan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	133	Sekretaris Daerah	Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian,Serah Terima Jabatan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	134	Badan/ Lembaga Non Struktural Daerah	Muspida dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	135	Pembentukan Daerah/Pemekaran					
135.1	Pembentukan Daerah Otonom		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	

1	2	3	4	5	6	7	8
	135.2	Administrasi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	135.3	Pemindahan Ibu Kota Kabupaten/Kota		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	136	Pembagian Wilayah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	137	Penyerahan Urusan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	138	Program Pengembangan Kecamatan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	138.1	Sambutan/Pengarahan/Amanat		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	138.2	Pembentukan Kecamatan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	138.3	Pemekaran Kecamatan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	138.4	Perluasan/PerubahanBatas Wilayah Kecamatan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	138.5	Pembentukan Perwakilan Kecamatan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
5.	140	Pemerintahan Desa/Kelurahan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	141	Kepala Kelurahan/Kepala Desa/Perangkat Desa	Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	142	Penghasilan Perangkat Desa		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	143	Kekayaan Desa	Tanah Kas Desa dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	144	Dewan Tingkat Desa	Badan Pertimbangan Desa,Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desadan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	145	Administrasi Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	146	Kewilayahan					
	146.1	Pembentukan Desa/Kelurahan		Terbatas	Eselon II, III, IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	146.2	Pemekaran Desa/Kelurahan		Terbatas	Eselon II, III, IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	146.3	Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	146.4	Perubahan Nama Desa/Kelurahan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	146.5	Kerjasama antar Desa/Kelurahan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	147	Dusun, Rukun Tetangga, Rukun Warga		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	148	Perangkat Kelurahan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	148.1	Kepala Kelurahan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	148.2	Sekretaris Kelurahan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	148.3	Staf Kelurahan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	149	Dewan Kelurahan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	149.1	Rukun Tetangga		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	149.2	Rukun warga		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat

1	2	3	4	5	6	7	8
	149.3	Rukun Kampung		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
6.	150	Dewan Pimpinan Daerah/Dewan PerwakilanRakyat		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	151	Keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	151.1	Pencalonan, Pemilihan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	151.2	Pemberhentian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	151.3	Recall		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	151.4	Pelanggaran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	152	Persidangan Dewan Pimpinan Daerah	Sidang Pleno, Dengar Pendapat, Rapat Komisi, Reses	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	153	Kesejahteraan Dewan Pimpinan Daerah	Keuangan, Penghargaan, Asuransi	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	154	Hak Dewan Pimpinan Daerah	Hak Angket, Interpelasi dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	155	Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat	Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, <i>Recall</i> , Meninggal, Pelanggaran, Pergantian Antar Waktu	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	156	Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat	Sidang Pleno, Dengan Pendapat, Rapat Komisi, Reses	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	157	Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat	Keuangan, Penghargaan dan Asuransi	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	158	Jawaban Pemerintah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
159	Hak Dewan Perwakilan Rakyat	Hak Angket, Interpelasi dan sebagainya	Terbatas	Eselon II,III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	
7.	160	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Daerah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis
	161	Keanggotaan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	161.1	Pencalonan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	161.2	Pengangkatan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	161.3	Pemberhentian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	161.4	<i>Recall</i>		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	161.5	Meninggal		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	161.6	Pelanggaran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	162	Persidangan	Sidang Pleno, Dengar Pendapat, Rapat Komisi, Reses	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	163	Kesejahteraan	Keuangan, Penghargaan, Hak, Asuransi dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	164	Hak	Hak Angket, Interpelasi dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	165	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	166	Legislasi	Narasumber, Tenaga Ahli	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
167	Pengganti Antar Waktu (PAW)		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	
168	Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	
169	Dialog Interaktif/Dengar Pendapat/Audiensi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	
8.	170	Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota		Biasa/Terbuka	Eselon II, III, IV dan Internal	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	171	Keanggotaan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	171.1	Pencalonan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	171.2	Pengangkatan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	171.3	Pemberhentian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	171.4	<i>Recall</i>		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	171.5	Pelanggaran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	172	Persidangan	Sidang Pleno, Dengar Pendapat, Rapat Komisi, Reses	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	173	Kesejahteraan	Keuangan, Penghargaan, Asuransi dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	174	Hak	Hak angket, Interpelasi dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	175	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	176	Legislasi	Narasumber, Tenaga Ahli	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	177	Pengganti Antar Waktu		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	178	Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	179	Dialog Interaktif/Dengar Pendapat/Audiensi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
9.	180	Hukum					
	180.1	Konstitusi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	180.11		Dasar Hukum	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	180.12		Undang-Undang Dasar	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	180.2	Garis Besar Haluan Negara		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	180.3	Amnesti, Abolisi dan Grasi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	181	Perdata					
	181.1	Tanah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	181.2	Rumah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	181.3	Utang Piutang		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	181.31		Gadai	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	181.32		Hipotik	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	181.4	Notariat		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	182	Pidana	Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	183	Peradilan	Bantuan Hukum/Advokat/Pengacara	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	184	Hukum Internasional		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	185	Imigrasi	Visa, Paspor, <i>Exit, Reentry</i> , Lintas Batas/Batas Antar Negara,Suaka Politik	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	186	Kepenjaraan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	187	Kejaksaan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat

1	2	3	4	5	6	7	8
	188	Peraturan Perundang-undangan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.1	Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.2	Undang-Undang Dasar		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.3	Peraturan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.31		Peraturan Pemerintah	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.32		Peraturan Menteri	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.33		Peraturan Lembaga Non Kementerian	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.34		Peraturan Daerah	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.35		Peraturan Gubernur	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.36		Peraturan Bupati/Wali Kota	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.37		Peraturan Kepala Instansi	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.4		Keputusan	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.41		Keputusan Presiden	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.42		Keputusan Menteri	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.43		Keputusan Lembaga Non Kementerian	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.44		Keputusan Gubernur	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.45		Keputusan Bupati/Wali Kota	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	188.46		Keputusan Kepala Instansi	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	189	Hukum Adat	Tokoh Adat/Masyarakat	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
10.	190	Hubungan Luar Negeri		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	191	Perwakilan Asing		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	192	Tamu Negara		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	193	Kerjasama dengan Negara Asing		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	193.1		<i>Association of Southeast Asian Nations</i>	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	193.2		Bantuan Luar Negeri dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	194	Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	195	Perserikatan Bangsa-Bangsa		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	196	Laporan Luar Negeri		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	197	<i>Memorandum of Understanding</i>		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat

III. POLITIK/ORGANISASI DAN KEMASYARAKATAN (200).

N0	KODE	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	200	Politik/Organisasi dan Kemasyarakatan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang teknis
	201	Kebijaksanaan Umum		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	202	Kebangsaan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	203	Reformasi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
2.	210	Kepartaian	Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembubaran	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	211	Lambang Partai		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	212	Kartu Tanda anggota		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	213	Bantuan Keuangan Parpol		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
3.	220	Organisasi Kemasyarakatan/Pekerja Sosial Masyarakat		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	221	Berdasarkan Perjuangan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	221.1	Perintis Kemerdekaan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	221.2	Angkatan 45		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	221.3	Veteran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	222	Berdasarkan Kekaryaan	Wredatama	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	223	Berdasarkan Kerohanian	Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan lain-lain	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	224	Lembaga Adat		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	225	Surat Keterangan Terdaftar		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
4.	230	Organisasi Profesi Dan Fungsional					
	231	Organisasi Profesi		Biasa/Terbuka	Eselon II,III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	231.1	Ikatan Dokter Indonesia					
	231.2	Persatuan Guru Republik Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	231.3	Persatuan Advokat Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	231.4	Lembaga Bantuan Hukum		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	231.5	Korps Pegawai Republik Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	231.6	Persatuan wartawan Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	231.7	Asosiasi Arsiparis se-Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	231.8	Ikatan Pustakawan Indonesia dan sebagainya		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	232	Lembaga Adat		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
233	Surat Keterangan Terdaftar		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis	
5.	240	Organisasi Pemuda		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	241	Komite Nasional Pemuda Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	242	Organisasi Mahasiswa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	243	Organisasi Pelajar		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	244	Gerakan Pemuda Islam Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	245	Karang Taruna dan sebagainya		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
6.	250	Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	251	Organisasi Buruh	Federasi Buruh Seluruh Indonesia, Organisasi Buruh Internasional dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	252	Organisasi Tani	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	253	Organisasi Nelayan	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
7.	260	Organisasi Perempuan/ Wanita		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	261	Dharma Wanita	Dharma Wanita Persatuan, Dharma Pertiwi	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	262	Kongres Wanita Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	263	Persatuan Wanita Republik Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	264	Badan Koordinasi Organisasi Wanita		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	265	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	266	Lembaga Swadaya Masyarakat Wanita		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
8.	270	Pemilihan Umum(Presiden dan Wakil Presiden,Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah)		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	271	Pencalonan, Nomor Urut Partai, Kampanye/Dana/Petugas Pemilihan Umum		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	272	Tanda Gambar		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	273	Kampanye		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	274	Petugas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Umum		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	275	Pemilih		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	276	Sarana		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	276.1	Tempat Pemungutan Suara		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	276.2	Kendaraan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	276.3	Surat Suara		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	276.4	Kotak Suara		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	276.5	Dana		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	277	Pemungutan Suara		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	278	Hasil Pemilihan Umum		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
279	Penetapan Perolehan Jumlah Kursidan Calon Terpilih		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7	8
	281		Pencalonan/Penetapan	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	282	Tanda Gambar	Personalia/Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	283	Kampanye		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	284	Petugas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	285	Pemilih		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	286	Sarana		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	286.1	Tempat Pemungutan Suara		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	286.2	Kendaraan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	286.3	Surat Suara		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	286.4	Kotak Suara		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	286.5	Dana		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	287	Pemungutan Suara		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	288	Hasil Pemilihan Umum		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	288.1	Perhitungan Suara		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	288.2	Sidang Paripurna		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	288.3	Pelantikan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	288.4	Sumpahjanji		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
10.	290	Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/ Wakil Wali Kota		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	291	Pencalonan	Seleksi Administrasi, Tes Kesehatan dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	292	Tanda Gambar	Personalia/Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	293	Kampanye		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	294	Petugas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	295	Pemilih		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	296	Sarana		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	296.1	Tempat Pemungutan Suara		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	296.2	Kendaraan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	296.3	Surat Suara		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	296.4	Kotak Suara		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	296.5	Dana		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	297	Pemungutan Suara		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	298	Hasil Pemilihan Umum		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	298.1	Perhitungan Suara		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	298.2	Sidang Paripurna		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat

1	2	3	4	5	6	7	8
	298.3	Pelantikan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	298.4	Sumpah Janji Serah Terima Jabatan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat

IV. KEAMANAN/KETERTIBAN (300).

NO	KODE	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	300	Keamanan/Ketertiban		Terbatas	Eselon II,III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	301	Keamanan Ketertiban Masyarakat		Terbatas	Eselon II,III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	302	Intelijen		Terbatas	Eselon II,III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
	303	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		Terbatas	Eselon II,III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat
2.	310	Pertahanan		Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
	311	Darat		Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
	312	Laut		Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
	313	Udara		Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
	314	Perbatasan		Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
3.	320	Kemiliteran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	321	Latihan Militer		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	322	Kerjasama Militer		Rahasia	Eselon II, dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
	323	Operasi Militer		Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
	324	Kegiatan Tentara Menunggal Masuk Desa		Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
	325	Fasilitas Militer	Barak, Persenjataan, Markas	Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
4.	330	Keamanan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	331	Kepolisian	Polisi Pamong Praja	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	332	Huru Hara/Demonstrasi		Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
	333	Senjata Api/Tajam		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	334	Bahan Peledak/Bom		Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
	335	Perjudian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	336	Surat-surat kaleng		Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
	337	Perlindungan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	338	Pengaduan,		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	339	Himbauan/Larangan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
5.	340	Pertahanan Sipil		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	341	Perlindungan Masyarakat		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	342	Satuan Pengamanan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	343	Forum Koordinasi Polisi Masyarakat		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
6.	350	Kejahatan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	351	Makar/Pemberontakan/Subversi/Organisasi Terlarang/SARA/Cyber Crime		Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
	352	Pembunuhan, Bunuh Diri, Penemuan Mayat		Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
	353	Penganiayaan, Pencurian/Perampasan		Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
	354	Penyelundupan/Narkotika/Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya		Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
	355	Pemalsuan	Pemalsuan Uang, Pemalsuan Ijazah dan Kejahatan Pemalsuan lainnya	Rahasia	Eselon II dan III	Mengakibatkan terganggunya kemandirian dilingkungan Pemerintahan	Bidang Teknis
	356	Korupsi/Kolusi/Nepotisme/Penyelewengan/ Penyalahgunaan Jabatan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	357	Kejahatan/Kekerasan terhadap Perempuan	Kekerasan Fisik, Perkosaan, Kehamilan Tidak Diharapkan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penelantaran, Pelecehan, Pencabulan, Perdagangan Wanita, Rivalah Korban	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	358	Kenakalan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	359	Pornografi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
7.	360	Bencana		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	361	Bencana Alam	Banjir, Gempa Bumi dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	362	Bencana Sosial	Kerusuhan Massa, Peperangan dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	363	Bencana Kegagalan Teknologiseperti Bencana Nuklir dan lain-lain		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	364	Kesiap Siagaan Bencana		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	365	Koordinasi Bencana		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	366	Tanggap Darurat		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	367	Pasca Bencana		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	368	Relawan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	369	Pelatihan Kebencanaan	Tindakan/Reaksi Cepat Tim Reaksi Cepat, Search And Rescue, Logistik dan Dapur Umum, Fasilitator Desa Tangguh/Sekolah Siaga Bencana, Gladi PosKomando/Lapangan/Simulasi Penanggulangan Bahaya, Penanggulangan Bahasa Kebakaran dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
8.	370	Kecelakaan Search And Rescue		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	371	Kecelakaan Laut		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	372	Kecelakaan Pendakian Gunung		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	373	Kecelakaan sungai/Telaga/Waduk		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	374	Kecelakaan Listrik		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	375	Kecelakaan Lalu Lintas		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	376	Search And Rescue		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	377	Pencarian dan Penemuan Korban Kecelakaan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT (400).

NO	KODE	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	Kesejahteraan Rakyat		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	401	Keluarga Miskin		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	402	Pemberdayaan Masyarakat		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	403	Asuransi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
2.	410	Pembangunan Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411	Pembinaan Usaha Gotong Royong		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.1	Swadaya Gotong Royong		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.11		Penataan Gotong Royong	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.12		Gotong Royong Dinamis	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.13		Gotong Royong Statis	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.14		Pungutan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.2	Lembaga Sosial Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.21		Pembinaan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.22		Klasifikasi	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.23		Proyek	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.24		Musyawarah	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.3		Latihan Kerja Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.31		Kader Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.32		Kuliah Kerja Nyata	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.33		Pusat Latihan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.34		Kursus-Kursus	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.35		Kurikulum/Sylabus	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.36		Keterampilan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	411.37		Pramuka	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
411.4		Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis	
411.5		Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis	

1	2	3	4	5	6	7	8
	411.6		Kelembagaan Desa	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	412	Perekonomian Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	412.1	Produksi Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	412.2	Keuangan Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	412.3	Koperasi Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	412.4	Penataan bantuan Pembangunan Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	412.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	412.6	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	412.7	Badan Usaha Milik Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	413	Prasarana Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	413.1	Prasarana Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	413.2	Pemukiman Kembali Penduduk		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	413.3	Masyarakat Pradesa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	413.4	Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	414	Pengembangan Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	414.1	Tingkat Perkembangan Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	414.2	Unit Daerah Kerja Pembangunan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	414.3	Tata Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	414.4	Perlombaan Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	415	Koordinasi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	415.1	Sektor Khusus		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	415.2	RKH (Rapat Koordinasi Horizontal)		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	415.3	Tim Koordinasi Pusat		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
3.	420	Pendidikan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421	Sekolah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.1	Pra sekolah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.2	Sekolah Dasar		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.3	Sekolah Menengah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.4	Sekolah Tinggi/ Perguruan Tinggi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.5	Sekolah Kejuruan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.6	Rintisan Sekolah Berstandar Internasional		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.7	Sekolah Pendidikan Luar Biasa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.8	Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.9	Pendidikan Anak Putus Sekolah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	421.10	Kegiatan Sekolah Dies Natalis		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.11	Lustrum		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.12	Usaha Kesehatan Sekolah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.13	Kegiatan Belajar (Reuni, Darmawisata, Pelajar Teladan, Resimen Mahasisw		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.14	Organisasi Siswa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.15	Madrasah Diniyah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.16	Sekolah berciri agama		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	421.17	Pertukaran Pelajar/Mahasiswa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	422	Administrasi Sekolah	Persyaratan Masuk Sekolah, Ujian, Pendaftaran		Eselon II, III dan IV		
	422.1	Mapram, perpeloncoan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	422.2	Tahun Pelajaran		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	422.3	Hari Libur		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	422.4	Uang Sekolah/Surat Pesetujuan Pembayaran		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	422.5	Bea Siswa, Bantuan Biaya Pendidikan (misalnya Program Kompensasi Pengurang Subsidi Bahan Bakar Minyak,Bantuan Operasional Sekolah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	422.6	Akreditasi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	423	Metode Belajar			Eselon II, III dan IV		
	423.1	Kuliah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	423.2	Ceramah, Symposium		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	423.3	Diskusi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	423.4	Kuliah Lapangan, Widyaiswara, Kuliah Kernja Nyata, Studi Tur, Praktek Kerja Lapangan		Biasa/Terbuka	Eselon II,III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	423.5	Kurikulum		Biasa/Terbuka	Eselon II ,III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	423.6	Karya Tulis		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	423.7	Ujian		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	424	Tenaga Pengajar, Dosen, Guru, Dekan, Rektor		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	425	Sarana Pendidikan			Eselon II, III dan IV		
	425.1	Gedung (Gedung Sekolah, Kampus,Pusat Kegiatan Mahasiswa)		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	425.2	Buku		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	425.3	Perlengkapan Sekolah, <i>Block Grand</i>		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	426	Keolahragaan			Eselon II, III dan IV		
	426.1	Cabang Olahraga		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	F	Sarana	Gedung Olahraga, Stadion, Lapangan, Kolam Renang, Pesta Olahraga Nasional (PON), Pekan Olah Raga dan Seni Antar Diniyah, Olimpiade dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	426.3	Komite Olahraga Nasional Indonesia, Organisasi Induk Olahraga (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Persatuan Catur Seluruh Indonesia dan sebagainya)		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	426.4	Penghargaan Bidang Olahraga		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	426.5	Lambang Olahraga		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	427	Kepemudaan	Meliputi organisasi dan Kegiatan Remaja Klasifikasi disini adalah Gelanggang Remaja	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	428	Kepramukaan dan Kepanduan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
4.	430	Kebudayaan	Pengembangan Budaya, Desa Budaya, Wisata Budaya, Kerjasama Kebudayaan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	431	Penobatan Gelar Adat	Kesenian (Cabang Kesenian), Sarana (Berkas Tentang Gedung Kesenian)	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	432	Budaya Melayu		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	433	Kepurbakalaan/Peninggalan Sejarah	Meliputi Museum, Peninggalan Kuno (Candi, Termasuk Pemugaran), Benda Cagar Budaya, Pengkajian dan Penelitian Konsevasi Kepurbakalaan, Penggalan dan Inventarisasi Kepurbakalaan, Perlindungan Peninggalan Kepurbakalaan, Bimbingan dan Preparasi	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	434	Sejarah	Meliputi Pengkajian dan Penelitian Konservasi Sejarah, Penggalan dan Inventarisasi Sejarah, Perlindungan Peninggalan Sejarah Kawasan Cagar Budaya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	435	Bahasa	Meliputi Kesusastraan, Lomba/Workshop/Kongres	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	436	Kesenian dan Hiburan	Meliputi Cabang Kesenian, Sarana (Gedung Kesenian), Seni Pertunjukan (meliputi Seni Tari, Seni Musik, Seni Teater, Seni Pedalangan, Seni Perfilman), Seni Rupa, Seni Karya, Festival/Parade/Lomba/Workshop/Pameran, Rekomendasi dan Rekonstruksi Seni	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	437	Adat dan Tradisi	Meliputi Upacara Tradisional, Permainan, Permainan Tradisional dan Perilaku/Kebiasaan Masyarakat yang Membudaya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	438	Kepercayaan	Termasuk Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	439	Penghargaan di Bidang Kebudayaan	Meliputi Penghargaan Bagi Pelaku Seni, Tokoh Budaya, Pelestarian Budaya/Benda Cagar Budaya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
5.	440	Kesehatan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	441	Pembinaan Kesehatan	Meliputi Gizi, Mata, Jiwa, Kanker, Usaha Kesehatan Sekolah, Perawatan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Integrasi ke Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat, Umum, anak, Dalam, Syarat, Obsgyn, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Visum, Rekomendasi, <i>International Standard Organisation</i> (ISO), Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD), Kesehatan Keluarga (Kesehatan Ibu, Kesehatan Bayi, Kesehatan Anak, Kesehatan Remaja, Kesehatan Lansia), Promosi Kesehatan (Penyebaran Media Massa, Desa Siaga, Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, Kesehatan Tradisional/Pemberdayaannya)	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	442	Obat-Obatan	Meliputi Pengadaan, Penyimpanan, Pengawasan, Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Apoteker, Pedagang Farmasi, <i>Sales/Pramuniaga Obat (Detailer)</i> , Obat Tradisional, Kosmetika	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	443	Penyakit Menular	Meliputi Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular, Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Tidak Langsung (Kusta, Kelamin, <i>Frambrosia</i> , Tuberkulosis, AIDS), <i>Epidemiologi</i> dan Karantina/ <i>Epidka</i> (Kholera, Imunisasi, <i>Survailense</i> , Rabies/Anjing Gila, Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber BinatangMalaria, <i>Dengue Haemorrhagic</i> /Demam Berdarah <i>Dihydroartemisinin + Piperakuin</i> , Filrial, Serangga, Flu Burung/ <i>Avian Influenza</i> , <i>Anthrax</i>), <i>Hygiene</i> Sanitasi (meliputi Tempat-Tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan danMinuman dan Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	444	GIZI	Meliputi Gizi Seimbang, Bahaya Kelaparan, Gizi Buruk/Kurang Gizi, Makanan Tambahan, Garam Beryodium, Makanan Pendamping Air Susu Ibu, Surveilens Gizi, Pangan dan Gizi, Kewaspadaan Pangan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	445	Rumah Sakit	Balai Kesehatan, Pusat Kesehata Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Poliklinik, Tipe Rumah Sakit/Kelas, Mobil <i>Ambulance</i> , <i>Trauma Centre</i>	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	446	Tenaga Medis	Meliputi Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Ijin Praktek, Paramedis (Bidan, Perawat, Fisioterapis, Refraksionos, Optision) dan Uji Kompetensi	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	447	Alat Medis	Meliputi Inventaris, Pengadaan, Perawatan, Penghapusan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	448	Pengobatan Tradisional	Meliputi Pijak, Tusuk jarum, Jamu Tradisional, PDukun/paranormal	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	449	Pelayanan Kesehatan	Meliputi Rekam Medis, Unit Gawat Darurat, Laboratorium, Radiologi, <i>General Check Up</i> , Surat Keterangan Kesehatan Umum/Jiwa/Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Pos Pelayanan Terpadu (Bawah Lima Tahun, Lanjut Usia), Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Kesehatn Ibu dan Anak, Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
6.	450	Agama		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451	Islam		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451.1		Peribadatan (Sholat, Zakat, Fitrah, Infaq, Sodaqoh, Hibah, Wakaf, Baitul Mal, Harta Agama, Puasa)	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451.2		Rumah Ibadah	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451.3		Tokoh Agama	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451.4		Kajian Studi Keberagaman Islam	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451.5		Dialog	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451.6		Kunjungan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451.7		Sarasehan Pemuka/Tokoh Agama	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451.8		Kerukunan Umat Beragama	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451.9		Fasilitas Pesantren	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451.10		Musabaqoh Tilawatil Al-Qur'an	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451.11		Forum Komunikasi Pondok Pesantren	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451.12		Pendidikan (Tinggi, Menengah, Dasar, Pondok, Pesantren,Gedung Sekolah, Tenaga Pengajar, Buku, Dakwah, Organisasi/Lembaga Pendidikan)	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451.13		Peradilan, Hukum Agama	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451.14		Organisasi Keagamaan Bukan Politik	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	451.15		Majelis Ulama	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	451.16		Mazhab	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	452	Protestan			Eselon II, III dan IV		
	452.1		Peribadatan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	452.2		Rumah Ibadah	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	452.3		Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	452.4		Mazhab	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	453	Katholik			Eselon II, III dan IV		
	453.1		Peribadatan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	453.2		Rumah Ibadah	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	453.3		Tokoh Agama, Rohaniawan, Pastor	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	453.4		Mazhab	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	453.5		Organisasi Gerejani	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	454	Hindu			Eselon II, III dan IV		
	454.1		Peribadatan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	454.2		Rumah Ibadah	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	454.3		Tokoh Agama, Rohaniawan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	454.4		Mazhab	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	454.5		Organisasi Keagamaan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	455	Budha			Eselon II, III dan IV		
	455.1		Peribadatan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	455.2		Rumah Ibadah	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	455.3		Tokoh Agama, Rohaniawan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	455.4		Mazhab	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	455.5		Organisasi Keagamaan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	455.6		Penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	456	Urusan Haji	Ongkos Naik Haji (ONH), Manasik, Persatuan Djamaah Haji Indonesia (PHI), Pemondokan Haji	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	457	Forum Antar Umat Beragama		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
7.	460	Sosial		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	461	Rehabilitasi Penderita Cacat	Cacat Mata, Cacat Tubuh, Cacat Mental, Bisu/Tuli, Unit Pelayanan Sosial Keliling, Hipenca, Orsos Cacat, Loka Bina Karya, Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Praktik Kerja Lapangan, Pendidikan dan Pelatihan Penyandang Cacat, Asistensi Keluarga Penyandang Cacat, Konseling, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Kampanye Sosial Penyandang Cacat Sosial, Pengasramaan Murid Sekolah Luar Biasa	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	462	Tuna Susila	Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, Orang Telantar, Fakir Miskin, Korban Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome. Gay, Waria, Eks Nara Pidana, Bekas Sakit Jiwa, Wanita Rawan Sosial, Anak Nakal	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	463	Kesejahteraan Anak/Keluarga	Gender, Pengarus Utama Gender, Analisa, Kesetaraan dan Keadilan Gender, Anak Putus Sekolah, Ibu Teladan, Tim Reaksi Cepat Anak, Program Kesejahteraan Sosial Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Gender, Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera, Desa Prima, Bina Keluarga Bawah Lima Tahun, Pengelola Bina Keluarga Bawah Lima Tahun, Rumah Sakit Sayang Ibu Bawah Lima Tahun, Penjualan Manusia	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	464	Pembinaan Pahlawan	Pahlawan (Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan Kepada Pahlawan dan Jandanya), Veteran, Pelestarian Nilai Nilai Kepahlawanan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	465	Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia, Pengungsi, Repatriasi (Pekerjaan Migran), <i>Trauma Centris, Day Care, Home Care</i> , Eksodan Daerah Konflik/Bencana Sosial, Jaminan Sosial Keluarga Miskin	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	466	Sumbangan Sosial	Sumbangan Untuk Korban Bencana, Pencarian Dana Untuk Sumbangan Penyelenggaraan Undian, Bazaar, Panti asuhan, Bantuan Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bantuan/Subsidi Langsung Untuk Fakir Miskin (misalnya Bantuan Subsidi Langsung Tunai, Beras Untuk Orang Miskin/Raskin), Bantuan Eks Kronis, Bantuan Langsung Tunai	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	467	Bimbingan Sosial	Komunitas Adat Terasing, Masyarakat Suku Terasing (Bimbingan, Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman, Operasi Busana dan sebagainya), Pemberdayaan Perempuan (Organisasi Wanita, Perempuan Korban Kekerasan, Pemberdayaan Perempuan Perkotaan, Pemberdayaan Perempuan Pedesaan, Bimbingan Pemantapan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Ekonomi Produktif	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	468	Palang Merah Indonesia	Donor Darah, Bulan Dana Palang Merah Indonesia, Pelatihan Palang Merah Indonesia	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	469	Makam	Pemakaman Umum, Makam Pahlawan, Makam Raja, Makam Tokoh, Makam Pejuang, Krematorium	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
8.	470	Kependudukan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	471	Kewarganegaraan Indonesia	Warga Negara Indonesia Asli, Warga Negara Indonesia keturunan Asing, (Permohonan Kewarganegaraan, Ganti Nama), Asimilasi	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	472	Kewarganegaraan Asing		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	473	Tidak Berkewarganegaraan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	474	Pendaftaran Penduduk	Biodata, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Advokasi Identitas Penduduk, Pengungsi dan Penduduk Rentan Akibat Bencana Alam/Kerusuhan Sosial/Daerah Terbelakang	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	475	Perpindahan Penduduk	Meliputi : Imigrasi/Emigrasi, Transmigrasi, Urbanisasi	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	476	Keluarga Berencana		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	477	Pencatatan Sipil	Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Adopsi (Pangangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak), Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi, Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	478	Informasi Kependudukan	Teknologi Informasi, Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi, Pengolahan Data Kependudukan, Pelayanan Informasi Kependudukan	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
				Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	479	Perkembangan Penduduk	Pengarahan Kuantitas Penduduk, Pengembangan Kuantitas Penduduk, Penataan Persebaran Penduduk, Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk, Pengembangan Kawasan Kependudukan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
9.	480	Informasi Dan Komunikasi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	481	Media Massa	Penerbitan Surat Kabar, Majalah Milik Pemerintah/Instansi, Buku, Leaflet, Brosur, Pembredialan, Jurnal, Media Massa Asing, Penerjemah	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	482	Radio	Perizinan, Program/Acara/Personil, Radio Republik Indonesia, Radio Komunitas, Radio Swasta, Radio Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	483	Televisi	Perizinan, Program, Acara, Personil, Tayangan, Dampak dan Lembaga Sensor	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	484	Film	Film Cerita, Dokumenter, Sinetron, Perusahaan Film, Peredaran Film, Film Asing	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	485	Pers	Kewartawanan, (wawancara/Konfrensi Pers, Perss Tour/Studi Banding, Profesi, Somasi)	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	486	Grafika	Perizinan, Mesin Cetak, Personil	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	487	Penerangan dan Pemberdayaan Informasi	Pameran Non Komersil, Forum Komunikasi, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pertunjukkan Rakyat (Pertunra), Siaran Keliling dan Sosialisasi	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	488	<i>Operation Room</i>		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	489	Hubungan Masyarakat	Sambutan/Pidato, Peliputan, Release, Telaah Staf, Sponsorship, Bakohumas	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
10.	490	Pengaduan Masyarakat		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

VI. PEREKONOMIAN (500).

NO	KODE	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	500	Perekonomian		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	501	Dewan Stabilisasi Ekonomi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	502	Pengadaan Pangan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	503	Pengadaan Sandang		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	504	Sumber Daya Wilayah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
2.	510	Perdagangan					
	510.1	Promosi Perdagangan, Pekan Raya, Iklan, Pameran		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	510.2	Pelelangan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	510.3	Tera		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	510.4	Perizinan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	511	Pemasaran	Sembilan Bahan Pokok, Pasar Pertokoan, Kaki Lima, Kios	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	512	Ekspor		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	513	Impor		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	514	Perdagangan Antar Pulau (Lokal, Regional)		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	515	Izin Perdagangan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	516	Pegudangan	Tangki Penyimpanan Minyak Goreng	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	517	Aneka Usaha Perdagangan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	518	Koperasi	Pembinaan Koperasi, Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Koperasi Produksi (Produksi Pertanian, Produksi Peternakan, Produksi Perkebunan), Koperasi Simpan Pinjam	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	519	Usaha Kecil dan Menengah	Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah, Pendataan Usaha Kecil dan Menengah, Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
3.	520	Pertanian	Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia, Lomba Pameran, <i>Workshop</i> , Rapat Koordinasi, Rapat Kerja Bidang Pertanian				
	521	Tanaman Pangan dan Hortikultura		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	521.1		Program (Perencanaan Data, Pelaporan, Evaluasi, Penyuluhan, termasuk Kredit misalnya Dana Penguatan Modal/Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, Bantuan Penguatan Langsung Masyarakat)	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	521.2		Produksi (Padi, Palawija, Jagung, Ketela Pohon/Ubi-ubian, Hortikultura, Sayuran/Buah-buahan, Tanaman Hias, Pembudidayaan Rumput Laut)	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	521.3		Agrobisnis	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	521.4		Panen Gagal/Puso	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	522	Sarana Usaha Pertanian	Peralatan, misalnya Traktor, Pembibitan, Pupuk, Persawahan, Perladangan, Kebun, Lahan Kritis, Tegalan, Pengusaha, Petani, Bina Usaha, Pasca Panen, Pemasaran Hasil, Pemetaan Pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	523	Perlindungan Tanaman	Penyakit, Hama (Pemberantasan dan Upaya Pencegahan), Pestisida	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	524	Peternakan	Susu Ternak Rakyat, Sarana Usaha Peternakan, Pembibitan, Semen Beku, Inseminasi Buatan, Kesehatan Hewan, Pemberantasan Penyakit dan Upaya Pencegahan Izin/Rekomendasi Pemasukan, Pengeluaran Hewan Ternak dan Hewan Peliharaan, Ternak Ulut Sutera, Ternak Sarang Burung Walet, Kandang Ternak, makanan ternak, Rumah Potong Hewan, Rumah Potong Ayam, Data Peternakan, Perunggasan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	525	Kehutanan	Hak Pengusahaan Hutan, Tata Guna Hutan, Kayu, Non Kayu, Penghijauan, Kelestarian Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa, Kayu Cendana, Larangan Ijin Berburu, Perburuan Liar, Kebun Binatang, Tumpang Sari, Peternakan Lebah, Pengolahan Hasil Hutan, Pembibitan, Penyakit/Hama, Jenis Jenis Hutan, Keamanan Hutan, Jaga Wana/Polisi Hutan, Lomba Pameran, <i>Workshop</i> , Rakor, Raker Bidang Kehutanan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	526	Perkebunan	Tanaman Langka, Tanaman Kimia, Teh, Tembakau, Tebu, Cengkeh, Coklat, Jambu Mete, Jarak Pagar, Kopi, Lomba Pameran, <i>Workshop</i> , Rapat Koordinasi, Rapat Kerja Bidang Perkebunan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	527	Perikanan	Program Penyuluhan, Produksi, Fasilitas Perijinan Perikanan Tangkap dan Budidaya, Pengembangan Perikanan Tangkap, Pengembangan Budidaya Perikanan, Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan, Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, Dana Penguatan Modal, Sarana, Peralatan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Perikanan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	528	Kelautan/ Pesisir	a. Kelautan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut, Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim, Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Kawasan Maritim Penyelenggaraan Hari Nusantara, Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Kelautan; b. Pesisir : Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Pesisir, Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Identifikasi dan Pemetaan Konservasi Lahan Pesisir, Pengembangan Konservasi Ekosistem Pesisir	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	529	Ketahanan Pangan	Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian, Pembinaan Gabungan Kelompok Tani, Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Analisis Ketersediaan Pangan/Pemberian Bantuan Daerah Rawan Pangan, Diversifikasi Pangan meliputi Program Percepatan Keanekaragaman Pangan dan Gizi, Kawasan Rumah Pangan Lestari, Keamanan dan Kewaspadaan Pangan meliputi Sistem Keamanan Pangan Terpadu, Lembaga Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah, Sertifikasi Jaminan Mutu Olahan Segar Kepada Pelaku Usaha/Kelompok Tani	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
4.	530	Perindustrian		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	531	Industri Logam		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	532	Industri mesin, Elektronik, Otomotif		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	533	Industri kimia, farmasi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	534	Industri Tekstil, Kerajinan, Rumahahan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	535	Industri Makanan/Minuman		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	536	Aneka Industri/Perusahaan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	537	Hak Kekayaan Intelektual		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	538	Badan Usaha Milik Negara	Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan/Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
539	Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis	
5.	540	Pertambangan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	541	Minyak Bumi	Bensin, Minyak Tanah, Solar, Pengusahaan (Eksploitasi/Pengeboran, Kontrak Kerja), Pengolahan, Penyaluran, Tangki, Pompa, Tanker				
	542	Gas Bumi	Elpiji	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	542.1	Eksplorasi/Pengeboran		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	542.11		Kontrak Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	542.2	Pengolahan	Tangki, Pompa, Taner	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	543	Logam Mulia	Emas, Intan, Perak	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	544	Logam	Timah, Aluminium, Bouksit, Mangan, Tembaga, Batu Bara, Besi termasuk Pasir Besi	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	545	Aneka Tambang/ Bahan Galian Termasuk Galian Golongan C		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	546	Geologi	Vulkanologi (Pengawasan Gunung Berapi), Sumur Artesis, Sumur Bor, Air Bawah Tanah	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
547	Hidrologi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis	
6.	550	Perhubungan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	551	Perhubungan Darat	Perizinan, Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau, Angkutan Jalan Raya termasuk Trans Metro, Angkutan Sungai, Angkutan Danau, Perkeretaapian, Kelas Jalan, Pemeriksaan Rambu Rambu, Pengamanan, Pengawasan, Rambu Rambu, <i>Traffic</i> , Jarak dan segala hal yang berkaitan dengan Perhubungan Darat	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	552	Perhubungan Laut	Lalu Lintas Angkatan Laut, Perkapalan, Pelabuhan, Sarana Pengamanan Pantai dan segala hal yang berkaitan dengan Perhubungan Laut, Pengawasan dan Keselamatan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	553	Perhubungan Udara	Lalu Lintas Udara, Pelabuhan Udara, Alat Angkutan, Gangguan Perhubungan Udara dan segala hal yang berkaitan dengan Perhubungan Udara, Pengawasan dan Keselamatan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	554	Angkutan Lebaran	Meliputi segala hal yang berkaitan dengan Angkutan Lebaran	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	555	Pos		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	556	Pariwisata	Program, Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata, Promosi Pariwisata, Atraksi Pariwisata, Kelembagaan Pariwisata, Kerjasama Bidang Pariwisata, SDM Pariwisata, Pelayanan Informasi Pariwisata	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	557	Telekomunikasi/Telematika	Telepon, Telegram, Telex, Stasiun Bumi, Satelit, Internet, Teknologi Informasi, Parabola/Antena/Tower dan segala masalah yang terkait dengan Telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	558	Gelombang Radio	Stasiun Radio, Televisi, Radio Amatir, Pemanfaatan Gelombang Radio, Perizinan, Gangguan dan Masalah yang Terkait dengan Gelombang Radio	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	559	Meteorologi dan Geofisika	semua masalah yang terkait dengan Bidang Meteorologi dan Geofisika seperti Curah Hujan, Perkiraan Cuaca, Informasi Gempa, Iklim, Angin Ribut, Klimatologi, Pergeseran Lapisan Bumi	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
7.	560	Ketenaga Kerjaan	Dewan Ketenagakerjaan, Mitra Praja Utama, Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	561	Pengupahan	Dewan Pengupahan, Upah Minimum Provinsi, Kebutuhan Hidup Layak	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	562	Penempatan Tenaga Kerja	Antar Kerja Daerah, Antar Kerja Lokal, Buras Kerja, Bursa Kerja Khusus, Informasi Pasar Kerja, Perluasan Kerja, Padat Karya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	563	Latihan Kerja	Komisi Pelatihan dan Produktivitas Lembaga, Lembaga Pelatihan Kerja, Pemagangan Dalam Negeri, Pelatihan Tenaga Kerja, Sertifikat Pelatihan Tenaga Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	564	Tenaga Kerja Sukarela	Tenaga Kerja Muda Profesional, Tenaga Kerja Mandiri Terdidik, Tenaga Kerja Mandiri Sektor Informal, Tenaga Usaha Mandiri Sektor Informal Waralaba, Grameen Bank, Teknologi Tepat Guna, Wira Usaha Baru, Perluasan Kerja Sistem Padat Karya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	565	Perselisihan Perburuhan	Perselisihan Hubungan Industrial, Arbitrasi, Mediasi, Konsiliasi	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	566	Keselamatan Kerja	Standarisasi dan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kecelakaan Nihil, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Klinik Perusahaan, Keluarga Berencana Perusahaan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	567	Pemutusan Hubungan Kerja	Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja, Pengangguran	Terbatas	Eselon II,III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	568	Kesejahteraan Buruh	Rusunawa, Balai Istirahat Pekerja/Karyawan, Fasilitas Sarana Buruh, Tunjangan Hari Raya, Koperasi Karyawan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	569	Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi Visa, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing, Rekomendasi Izin Tinggal, Tenaga Kerja Sukarelawan Luar Negeri, Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing, Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
8.	570	Permodalan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	571	Model Domestik		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	572	Modal Asing		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	573	Modal Patungan(Joint Venture)/ Penyertaan Modal		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	574	Pasar Uang dan Modal		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	575	Saham		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	576	Belanja Modal		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	577	Modal Daerah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
9.	580	Perbankan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	581	Kredit		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	582	Investasi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	583	Deposito		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	584	Bank	Bank Pembangunan daerah, Bank Milik Daerah Yang Lain	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	585	Alat Pembayaran	Cek, Giro, Wesel, Transfer	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	586	Fiscal		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	587	Hutang Negara, Obligasi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
10.	590	Agraria		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	591	Tata Guna Tanah	Pemetaan dan Pengukuran, Penyediaan Data, Peta dan Publikasi, Fatwa Tata Guna Tanah, Tanah Kritis, Tanah Gambut	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	592	Landreform	Redistribusi, (Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan Tanah Pertanian, Penentuan Tanah obyek Landreform, Pembagian Tanah Obyek Landreform, Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform), Ganti Rugi (Ganti Rugi Tanah Kelebihan/Sengketa, Ganti Rugi Tanah Absentee), Ganti Rugi Tanah Partikelir/Sengketa, Bagi Hasil (Penetapan Imbangan Bagi Hasil, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil, Sengketa Perjanjian Bagi Hasil), Gadai Tanah (Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah, Pelaksanaan Gadai Tanah, Sengketa Gadai Tanah), Bimbingan dan Penyuluhan, Pengembangan, Yayasan Dana Landreform	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	593	Pengurusan Hak Hak Tanah	Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis, Sewa Tanah (Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu), Hak Milik (Perorangan, Badan Hukum), Hak Pakai (Perorangan, Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing), Badan Hukum (Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing), Keduataan, Konsulat, Kantor Dagang Asing, Tanah Gedung Gedung Negeri, Guna Usaha (Perkebunan Besar, Perkebunan Rakyat, Peternakan, perikanan, kehutanan), Hak Guna Bangunan (Perorangan, Badan Hukum, Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda/Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda, Badan Hukum Asing Belanda-Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/Prk/1965, Pemulihan Hak, Hak Pengelolaan, Sengketa Tanah, Peradilan Perkara Tanah, Pencabutan dan Pembebasan Tanah, meliputi Pencabutan Hak, Pembebasan Tanah, Ganti Rugi Tanah	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	594	Pendaftaran tanah	Pengukuran/Pemetaan, fotogrametri, terestris, triangulasi, peralatan, dana pengukuran (Peraturan Menteri Agraria Nomor 61 Tahun 1965), sertifikat, Pejabat Pembuat Akta Tanah	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	595	Ketransmigrasian	Kerjasama Antar Daerah Bidang Transmigrasi, Forum Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Seleksi dan Perpindahan Transmigrasi, Kesehatan dan Pembekalan Transmigrasi, Pemukiman Transmigrasi	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

VII. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN (600).

N0	KODE	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	Pekerjaan Umum dan Ketenagaan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	601	Tata Bangunan,Konstruksi, IndustriKonstruksi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	602	Kontraktor Pemborong	Tender,Penunjukan, Prakualifikasi, Daftar Rekanan Mampu dan Tanda Daftar Rekanan,Lelang, Surat Perintah Kerja, Berita Acara Penyerahan Pekerjaan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	603	Arsitektur		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	604	Bahan Bangunan	Tanah, Batu, Pasir, Koral, Lempung, Kapur, Marmer, Aspal (Aspal Buatan, Aspal Alam), Besi (Beton,Besi Profil, Paku, Aluminium),Bahan-Bahan pelindung dan Pengawet, Semen, Kayu, Bahan Penutup Atap,Alat-alat Penggantung danPengunci, Steen Slaag, Split,Bahan-bahanBangunan lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	605	Instalasi	Instalasi Bangunan, Listrik, Instalasi Air/Sanitasi, Pengaturan Udara, Akustik, Cahaya/Penerangan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	606	Konstruksi Pencegahan	Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran, Gempa, Angin/Udara/Panas, Kegaduhan, Terhadap Gas/Explosive,Terhadap Serangga dan Radiasi Atom	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
2..	610	Pengairan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	611	Irigasi	Bangunan Waduk, Bangunan Pengambilan,Bangunan Pembawa, Bangunan Pengolahan,Box Tersier, Box Kwartier, Got Miring, Talang, Syphon, Gorong-Gorong, Pelimpah Samping, Jalan Inspeksi, Bangunan Pembuang,Bangunan, Gorong-Gorong Pembuang, Talang Pembuang, Syphon Pembuang	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	612	Poider	Tanggul Keliling/Parti, Bangun Pembawa, Stasiun Pompa Pemasukan, Bangunan Bagi Gorong-gorong (Syphon),Bangunan Pembuang, Saluran, Pintu Air Pembuangan, Gorong-gorong Pembuangan, Bangunan lainnya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	613	Pasang Surut	Bangunan Pembawa Saluran, Bangunan Pembuang Pintu,Pemasukan, Bangunan Pembuangan, Bangunan Pintu Pembuangan, Bangunan lainnya, Bangunan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	614	Pengendalian Sungai	Bangunan pengaman, Saluran pengaman, Bangunanlainnya, Stasiun	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	615	Pengamanan Pantai	Tanggul, Bronjong,Krib, Bangunan lainnya, Jety	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	616	Air Tanah (Jaringan Irigasi Air Tanah)	Stasiun pompas, bangunan pembawa, bangunan pembuang, bangunan lainnya, Sumur Bor, Reservoir, Saluran Irigasi	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	617	Bangunan lainnya	Jalan, Jembatan, Tangga Cuci, Kubangan Kerbau, Waduk Lapangan, Bangunan Penunjang, Jaringan Telepon, Stasiun Agro	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
3.	620	Jalan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	621	Jalan Nasional/Negara	Masalah-Masalah Fungsi Kalan, Klasifikasi Jalan, Muatan Sumbu Terberat, Daerah Penguasaan, Bangunan Sementara, Badan Jalan, Perkerasan, Drainage, Buku Trutoir, Median, Daerah Samping, Bangunan Pelengkap dan Masalah Lain Dalam Cakupan JalanNasional/Negara	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	622	Jalan Provinsi	Masalah-Masalah Fungsi Kalan, Klasifikasi Jalan, Muatan Sumbu Terberat, Daerah Penguasaan, Bangunan Sementara, Badan Jalan, Perkerasan, Drainage, Buku Trutoir, Median, Daerah Samping, Bangunan Pelengkap dan Masalah lain Dalam Cakupan Jalan Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	623	Jalan Kabupten/Kota	Masalah-Masalah Fungsi Kalan, Klasifikasi Jalan, Muatan Sumbu Terberat, Daerah Penguasaan, Bangunan Sementara, Badan Jalan, Perkerasan, Drainage, Buku Trutoir, Median, Daerah Samping, Bangunan Pelengkap, Jalan Desa, Jalan Lingkungan dan Masalah Lain dalam Cakupan Jalan Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
4.	630	Jembatan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	631	Jembatan Pada Jalan Kota	Daerah Penguasaan, Bangunan Sementara, Pekerjaan Tanah/ <i>Earth Work</i> , Pondasi, Bangunan Bawah, Bangunan, BangunanPengaman, Bangunan Pelengkap, Oprit	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	632	Jembatan Pada Jalan Luar Kota	Daerah Penguasaan, Bangunan Sementara, Pekerjaan Tanah/ <i>Earth Work</i> , Pondasi, Bangunan Bawah, Bangunan, BangunanPengaman, Bangunan Pelengkap, Oprit	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
5.	640	Bangunan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	641	Bangunan Pemerintah	Gedung Pusat Pemerintah Provinsi, Gedung Pusat Pemerintah Kota/Kabupaten, Gedung Perkantoran Lembaga Pemerintah, Gedung Balaikota, Gedung Pengadilan, Gedung Dewab Perwakilan Rakyat, Penjara, Gedung/Balai Pertemuan Milik Pemerintah, Gedung Perkantoranlainnya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	642	Bangunan Pendidikan	Perguruan tinggi, Sekolah Menengah (Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas), Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak, Bangunan Fasilitas Pendidikan lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	643	Bangunan Rekreasi	Bangunan olahraga, Gedung Kesenian, Gedung Pemancar, Bangunan Rekreasi lainnya, Hotel	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	644	Bangunan Perdagangan	Pusat Perbelanjaan, Gedung Promosi/ <i>Show Room</i> , Gedung Perdagangan, Kantor Bank, Bangunan Perdagangan Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	645	Bangunan Pelayanan Umum	Mandi Cuci Kakus Umum, gedung Parkir, Gedung Perkantoran Vital (Telkom, Kantor Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Daerah Air Minum, Air Limbah dan Sampah), Terminal Angkutan Udara, Terminal Angkutan Air, Terminal Angkutan Darat, Bangunan Keagamaan, Bangunan Fasilitas Umum lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	646	Bangunan Peninggalan Sejarah	Monumen, Candi, Rumah Tradisional, Situs Bersejarah lainnya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	647	Bangunan Industri	Bangunan Industri Besar, Bangunan Industri Sedang, Bangunan Industri Kecil (<i>Home Industri</i>), Bangunan Industri lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	648	Bangunan Tempat Tinggal	Rumah Pejabat Negara, Rumah Dinas Pejabat Lainnya, Rumah Milik Pemerintah Lainnya, Perumahan <i>Real Estate</i> , Perumahan <i>Sederhana</i> , Perumahan Pedesaan, Kawasan Pendukung Perumahan, Fasilitas Pendukung Perumahan Lainnya, Rumah Contoh dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	649	Elemen Bangunan	Pondasi, Dinding, Atap, Pintu/Jendela, Lantai, Fasilitas Kelengkapan Bangunan lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
6.	650	Tata Kota		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	651	Kawasan Perdagangan/ Pelabuhan	Daerah Pusat Perbelanjaan, Daerah Perkotaan dan Sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	652	Kawasan Pemerintah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	653	Kawasan Perumahan (<i>Site dan Service</i>)	Kepadatan Rendah (<i>Low Density</i>), Kepadatan Tinggi (<i>High Density</i>) dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	654	Daerah Industri	Industri Berat, Industri Ringan, Industry Rumah dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	655	Daerah Rekreasi	<i>Public Gardens</i> , <i>Sport</i> dan <i>Playing Fields</i> , <i>Open Space</i> dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	656	Transportasi (Tata Letak)	Jaringan Jalan (Penerangan Jalan), Jaringan Kereta Api, Jaringan Sungai	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	657	Pengelolaan Limbah	Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Pengolahan Limbah Industri/Padat dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	658	Pengelolaan Persampahan	Sarana Pengumpul Persampahan, Sarana Pemusnahan Persampahan dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	659	Pembuangan Air Hujan (<i>Drainase</i>)	Saluran Pembuangan Air Hujan, Bangunan Pelengkapan <i>Drainase</i> , Manajemen Pengelolaan <i>Drainase</i>	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
7.	660	Tata Lingkungan	Lingkungan, Kebersihan Lingkungan, Pencemaran (Air, Udara) dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	661	Daerah Hutan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	662	Daerah Pertanian/Perkebunan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	663	Daerah permukiman		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	664	Perlindungan dan Pelestarian Puspa dan Satwa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	665	Transportasi	Jaringan Jalan, Jaringan Kereta Api, Jaringan Sungai dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	666	Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencemaran Air, Pencemaran Udara, Pencemaran Tanah, Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Uji Emisi Gas Buang, <i>Better Air Quality</i> , Pengelolaan Sampah, Kesehatan Lingkungan, Kerusakan Alam, Kerusakan Lahan, Kerusakan Lapisan Ozon	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	667	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup	Hukum Lingkungan, Kajian Lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Motivator Lingkungan Hidup, Sekolah Berwawasan Lingkungan, Adipura, Adiwiyata, Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan, Organisasi Kemasyarakatan, Kampung Iklim	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	668	Pemulihan Lingkungan Hidup	Kalpataru, Perkumpulan Penghobi Ayam Kontes Nusantara, Pengembangan Pariwisata di Kawasan Karst, Kredit Usaha Kecil Daerah Aliran Sungai, Pantai Lestari, Penangann Kerusakan Lingkungan, Reklamasi, Konservasi Air (Sumur Peresapan), Biopori	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
669	Laboratorium, Pemantauan Kualitas, Analisis dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Uji Provisiensi, Semple, Pemantauan Kualitas Air (Tanah, Sungai, Laut), Pengukuran Fluktuasi Muka Air Tanah, Udara Ambien, Pengujian Kadar Limbah Padat dan Cair, Program Kali Bersih, Hari Bumi, Hari Cinta Puspa dan Satwa, Hari Lingkungan, Hari Ozon, Hari Sampah	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis	
8.	670	Ketenagaan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	671	Kelistrikan	Pembangkit Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Pengusahaan Listrik	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	672	Energi Baru Terbarukan	Tenaga Air, Tenaga Gas, Tenaga Minyak, Tenaga Angin, Tenaga Biogas, Tenaga Biomassa, Tenaga Uap dan Tenaga Surya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
9.	680	Peralatan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
10.	690	Air Minum	Air Minum Intake : <i>Broncaptering</i> , Sumur, Bendungan, Saringan, Pintu Air, Saluran Pembawa, Alat Ukurd dan Perpompaaan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	691	Air Baku	Mata Air, Sungai, Danau/Embung, Sumur Dalam, Air Hujan, Air Baku lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	692	Bangunan Produksi Air Minum	Bangunan Pengambilan Air Baku, Transmisi Air Baku, Sarana Penampungan Air Baku, Instalasi Pengolahan Air, Sarana Mekanikal dan Elektrikal, Bangunan Pelengkap lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	693	Sarana Transmisi dan Distribusi Air Minum	Perpipaan Transmisi/Distribusi, Bak Pelepas Tekanan, Bangunan Pelintas Pipa, Sarana/Peralatan Perlengkap Perpipaan, Bangunan Penampungan/Reservior, Sarana Mekanikal dan Elektrikal, Bangunan Pelengkap lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	694	Sarana Pemanfaat Produksi	Perpipaan Pelayanan (Pipa Dinas), Sambungan Langsung ke Rumah, Hidran Umum, Kran Umum, Terminal Air, Mobil Tangki Air, Hidran Kebakaran	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	695	Manajemen Pengelolaan Air Minum		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	696	Program Kerjasama Dengan Swasta		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	697	Perlindungan Sumber Air Baku		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

VIII. PENGAWASAN (700).

NO	KODE	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	Bidang Fasilitatif		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	701	Urusan Dalam		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	702	Peralatan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	703	Kekayaan/Aset Daerah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	704	Dokumentasi/Perpustakaan/Kearsipan/Sandi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	705	Perencanaan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	706	Organisasi/Tata Laksana		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	707	Penelitian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	708	Konferensi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	709	Perjalanan Dinas		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
2.	710	Bidang Pemerintahan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	711	Pemerintahan Pusat		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	712	Pemerintahan Daerah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	713	Pemerintahan Kabupaten/Kota		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	714	Pemerintahan Desa/ Kelurahan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	715	Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	716	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	717	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	718	Hukum		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	719	Hubungan Luar Negeri		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
3.	720	Bidang Politik					
	721	Kepartaian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	722	Organisasi Kemasyarakatan/Pekerja Sosial Masyarakat		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	723	Organisasi Profesi dan Fungsional		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	724	Organisasi Pemuda		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	725	Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	726	Organisasi Perempuan/Wanita		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	727	Pemilihan Umum (Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	728	Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	729	Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
4.	730	Bidang Keamanan/Ketertiban		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	731	Pertahanan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	732	Kemiliteran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	733	Keamanan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	734	Pertahanan Sipil		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	735	Kejahatan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	736	Bencana	Bidang Bencana	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	737	Kecelakaan/SAR	Bidang Kecelakaan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	738	Pelatihan SATGASOS		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
5.	740	Bidang Kesejahteraan Rakyat		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	741	Pembangunan Desa		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	742	Pendidikan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	743	Kebudayaan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	744	Kesehatan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	745	Agama		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	746	Sosial		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	747	Kependudukan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	748	Informasi dan Komunikasi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
6.	750	Bidang Perekonomian		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	751	Perdagangan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	752	Pertanian dan Perkebunan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	753	Perindustrian		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	754	Pertambangan/Kesamuderaan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	755	Perhubungan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	756	Ketenagakerjaan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	757	Permodalan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	758	Perbankan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	759	Agraria		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
7.	760	Bidang Pekerjaan Umum		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	761	Pengairan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	762	Jalan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	763	Jembatan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	764	Bangunan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	765	Tata Kota		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	766	Lingkungan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	767	Ketenagaan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	768	Peralatan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	769	Air Minum		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
8.	770	Bidang Pengawasan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	771	Pengawasan Legislatif		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	772	Badan Pemeriksa Keuangan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	773	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	774	Komisi Pemberantasan Korupsi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	775	Inspektorat Jenderal		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	776	Pengawasan Masyarakat		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	777	Inspektorat Provinsi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	778	Inspektorat Kabupaten/Kota		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
9.	780	Bidang Kepegawaian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	781	Pengadaan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	782	Mutasi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	783	Kedudukan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	784	Kesejahteraan Pegawai		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	785	Cuti		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	786	Penilaian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	787	Tata Usaha Kepegawaian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	788	Pemberhentian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	789	Pendidikan Pegawai		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
10.	790	Bidang Keuangan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	791	Anggaran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	792	Otorisasi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	793	Perbendaharaan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	794	Pembinaan Kebendaharaan		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	795	Akuntansi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	796	Verifikasi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	797	Pendapatan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	799	Kekayaan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

IX. KEPEGAWAIAN (800).

NO	KODE	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	800	Kepegawaian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
2.	810	Pengadaan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	811	Lamaran		Rahasia	Eselon II, III dan IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah	Bidang Teknis
	811.1		Testing	Rahasia	Eselon II, III dan IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah	Bidang Teknis
	811.2		Screening	Rahasia	Eselon II, III dan IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah	Bidang Teknis
	811.3		Panggilan	Rahasia	Eselon II, III dan IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah	Bidang Teknis
	812	Pengujian Kesehatan		Rahasia	Eselon II, III dan IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah	Bidang Teknis
	813	Pengangkatan Calon Pwngawai Negeri Sipil	Termasuk pengangkatan Calon Guru Sekolah Luar Biasa/Sekolah Luar Biasa	Rahasia	Eselon II, III dan IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah	Bidang Teknis
	814	Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap		Rahasia	Eselon II, III dan IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah	Bidang Teknis
3.	820	Mutasi		Rahasia	Eselon II, III dan IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah	Bidang Teknis
	821	Pengangkatan Jabatan/Pembebasan Jabatan	Pengangkatan Jabatan Struktural/Fungsional Umum/Tertentu, Pembebasan Jabatan, Termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	822	Kenaikan Gaji Berkala		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	823	Kenaikan Pangkat		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	824	Pemindahan/Pelimpahan/Perbantuan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	825	Datasering dan Penempatan Kembali/Pengaktifan Kembali		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	826	Penilaian Angka Kredit		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
827	Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis	
4.	830	Kedudukan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	831	Perhitungan Masa Kerja		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	832	Penyesuaian Masa Kerja/Ijazah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	833	Jenjang Pangkat		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
5.	840	Kesejahteraan Pegawai		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	841	Tunjangan	Jabatan, Kehormatan, Kematian, Perjalanan Dinas Tetap, Keluarga, Pangan, Uang Makan dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	842	Dana	Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kesehatan, Asuransi dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	843	Perawatan Kesehatan	General <i>Check Up</i> , Tes Kesehatan Pegawai yang Sakit	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	844	Koperasi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	845	Perumahan/Tanah	Perumahan Pegawai, Tanah Kapling	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	846	Bantuan Sosial	Beasiswa Anak Pegawai Negeri Sipil	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	847	Rekreasi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	848	Dispensasi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
6.	850	Cuti		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	851	Cuti Tahunan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	852	Cuti Besar		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	853	Cuti Sakit		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	854	Cuti Bersalin		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	855	Cuti Naik Haji/Ibadah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	856	Cuti Di Luar Tanggungan Negara		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	857	Cuti Alasan Penting		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	858	Cuti Bersama		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
7.	860	Penilaian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	861	Penghargaan	Bintang/Satyalancana, Kenaikan Pangkat Anumerta, Kenaikan Gaji Istimewa, Hadiah Berupa Uang, Pegawai Teladan dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	862	Hukuman	Teguran/Peringatan, Penundaan Kenaikan gaji, Penurunan Pangkat, Pemindahan dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	863	Konduite/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	864	Ujian Dinas		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	865	Laporan Pajak Pajak Pribadi	Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	866	Rehabilitasi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	867	Uji Kompetensi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	868	Tes Psikologi dan Bimbingan Konseling		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	869	Laporan Presensi Penilaian Kinerja		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
8.	870	Tata Usaha Kepegawaian		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

1	2	3	4	5	6	7	8
	871	Formasi	Usulan Perangkat Daerah, Usulan Permintaan Alokasi, Keputusan Penetapan Formal	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	872	Bezeeting		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	873	Registrasi	Nomor Induk Pegawai, Kartu Pegawai, Kartu Pegawai Elektronik, Legitimasi/Tanda Pengenal, Daftar Keluarga, Kartu Istri /Kartu Suami dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	874	Daftar Riwayat Pekerjaan	Tanggal Lahir, Penggantian Nama, Kepartaian/Organisasi dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	875	Kewenangan Mutasi Kepegawaian	Pelimpahan Wewenang, Specimen Tanda Tangan, Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas Kepala, Pengembangan Pegawai/Aparatur dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	876	Penggajian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	877	Sumpah/ Janji		Rahasia	Eselon II, III dan IV	Membawa dampak yang mengganggu kinerja perangkat daerah	Bidang Teknis
	878	Personil	Pengiriman, Permohonan, Penugasan dan sebagainya	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	879	Perkawinan/ Perceraian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
9.	880	Pemberhentian		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	881	Permintaan Sendiri		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	882	Hak Pensiun		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	883	Meninggal Dunia		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	884	Alasan Lain		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	885	Uang Pesangon		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	886	Uang Tunggu		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	887	Sementara Waktu		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	888	Tidak Dengan Hormat		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	889	Bebas Tugas		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
10.	890	Pendidikan Pegawai		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	891	Perencanaan dan Penawaran Diklat Termasuk Analisis Kebutuhan Diklat		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	892	Pendidikan Regular	Tugas Belajar, Izin Belajar, Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	893	Pendidikan Non Regular	Prajabatan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis, Fungsional dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	894	Pendidikan ke Luar Negeri		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	895	Metode	Kuliah, Ceramah, Simposium, Diskusi, Orientasi Lapangan, Kurikulum, Karya Tulis	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	896	Tenaga Pengajar	Widyaiswara, Narasumber, Pakar, Praktisi dan sebagainya	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	897	Administrasi Pendidikan	Tahun Pelajaran, Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	898	Fasilitas/Sarana	Tunjangan Belajar, Asrama, Uang Makan, Uang Transport dan Uang Sarana dan Prasarana	Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	899	Seminar Workshop/ Simposium, Bimbingan Teknis dan Sejenisnya		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis

X. KEUANGAN (900).

NO	KODE	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	Keuangan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	901	Nota Keuangan	Berkas pengantar nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPerubahan	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	902	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Dekonsentrasi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	903	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	904	Bantuan Luar Negeri		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	905	Bantuan Non Anggaran Pendpatan dan Belanja Negara		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	906	Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	907	Dana Alokasi Umum		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	908	Dana Alokasi Khusus		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
2.	910	Anggaran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	911	Perencanaan Anggaran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	912	Penetapan Anggaran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	913	Anggaran Belanja Tambahan		Terbatas	Eselon II,III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	914	Lembaran Kerja Anggaran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	915	Anggaran Setelah Perubahan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	916	Revisi Anggaran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	917	Perhitungan Anggaran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
3.	920	Kas Daerah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Bidang Teknis
	921	Surat Permintaan Pembayaran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	922	Surat Perintah Membayar		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8
	923	Surat Keterangan Penghentian Pembayaran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	924	Surat Perintah Pencairan Dana		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
4.	930	Kekayaan Daerah/Aset		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	931	Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	932	Inventarisasi Aset		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	933	Penghapusan Kekayaan Negara		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	934	Sewa Aset		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	935	Specimen Tanda Tangan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	936	Surat Tagihan Piutang		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	937	Tanda Bukti Penerimaan Setoran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
5.	940	Bina Administrasi Keuangan Daerah		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	941	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	942	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	943	Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Layanan Umum Daerah/Badan Usaha Kredit Pedesaan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	944	Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	945	Dana Alokasi Khusus		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	946	Pengamanan Barang Milik Negara		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	947	Pengangkatan/Penggantian Bendaharawan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	948	Pengkatan Penanggung Jawab Kegiatan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
6.	950	Akuntansi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	951	Surat Pertanggungjawaban		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	952	Permintaan Data Anggaran		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang

1	2	3	4	5	6	7	8
	953	Laporan Fungsional		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	954	Tagihan Laporan Surat Pertanggungjawaban		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	955	Neraca		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
7.	960	Verifikasi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
8.	970	Pendapatan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	971	Perimbangan Keuangan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	972	Subsidi		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	973	Iuran Hasil Hutan, Iuran Hasil Pengolahan Hutan, Dana Bagi Hasil, Pajak		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	974	Retribusi		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	975	Bea		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	976	Cukai		Biasa/Terbuka	Eselon II, III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	977	Pungutan		Biasa/Terbuka	Eselon II,III dan IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	978	Bantuan Presiden, Menteri		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
	979	Penerimaan Negara Bukan Pajak		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang
9.	980	Kekayaan		Terbatas	Eselon II, III dan IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah	Sekretariat dan Bidang

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL